

Peluncuran Kerjasama Peningkatan Pengelolaan Hutan

Jakarta, 31 Januari 2008 - Dalam rangka meningkatkan pengelolaan hutan di Indonesia, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) melakukan kerjasama dengan The Nature Conservancy (TNC), yang secara resmi diluncurkan pada hari Kamis 31 Januari 2008 bertempat di Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta. Kerjasama ini merupakan momentum penting untuk mendorong reformasi pembangunan kehutanan di Indonesia. Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan RI, Sunaryo, sedangkan sambutan Menteri Kehutanan RI dibacakan oleh Kepala Badan Litbang Kehutanan, Wahyudi Wardoyo. Peluncuran kerjasama ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara DKN dan TNC yang dilakukan oleh Hariadi Kartodihardjo selaku Ketua Presidium DKN dan Rili Djohani selaku *Country Director* TNC Indonesia. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara TNC dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) yang diwakili oleh Nana Suparna selaku Wakil Ketua Umum Bidang Produksi Hutan Alam. Tujuan utama dari kerjasama ini untuk mendukung perbaikan tata kelola dan kebijakan kehutanan serta pengarusutamaan pemenuhan legalitas hasil hutan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang berkelanjutan di Indonesia.

Hutan Indonesia dengan luas sekitar 123 juta ha merupakan sumber daya alam yang sangat penting dari sisi lingkungan, sosial dan ekonomi nasional. Di sisi lain, luasnya hutan di Indonesia menjadikan hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pembangunan kehutanan di Indonesia banyak mengalami tantangan baik dari segi kebijakan maupun operasional lapangan. Masih banyaknya praktek *illegal logging*, *deforestation* dan *degradation* merupakan sebagian dari berbagai masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah disamping implementasi dari peraturan-peraturan yang berlaku. Situasi perkembangan di dunia internasional mengenai isu perubahan iklim turut berpengaruh besar pada pengelolaan hutan Indonesia terutama terkait dengan rencana implementasi REDD (*Reduce Emission from Deforestation and Degradation*) di Indonesia.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah dan semua pihak pemangku kepentingan di negara ini dituntut untuk mengambil langkah nyata dalam melakukan perbaikan di berbagai bidang strategis dalam rangka meningkatkan pengelolaan hutan di Indonesia yang lebih bertanggung jawab, berkeadilan dan lestari. Hal ini dilakukan dengan cara mendorong investasi kehutanan, memberikan akses usaha yang lebih luas bagi masyarakat dan upaya konservasi serta pelestarian hutan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih baik, dibutuhkan pembangunan kondisi pemungkinnya, yang untuk mewujudkannya diperlukan perhatian dan kerjasama serta kesepahaman dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, pemerhati, masyarakat sipil maupun organisasi lain yang mempunyai kepedulian terhadap hutan dan kehutanan.

DKN adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh kongres Kehutanan Indonesia ke IV tahun 2007 yang dikukuhkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.39/Menhut-II/2007. Visi DKN adalah terciptanya tata pemerintahan kehutanan yang baik

guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan hutan lestari. DKN mempunyai fungsi bersama para pihak merumuskan kebijakan kehutanan, memfasilitasi dan mediasi hubungan antar pihak dalam penyelenggaraan kehutanan dan menyediakan informasi kehutanan serta melakukan evaluasi pelaksanaan sistem kehutanan

TNC telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1991, merupakan organisasi konservasi yang mempunyai misi untuk "melestarikan tumbuhan, hewan dan komunitas alami yang mewakili keberagaman hayati di atas bumi dengan cara melindungi daratan dan perairan yang mereka butuhkan untuk tetap hidup". Salah satu program TNC di bidang kehutanan adalah *Responsible Asia Forestry and Trade (RAFT)* yang mendorong peningkatan pengelolaan sumber daya hutan dan mendorong perdagangan kayu yang bertanggung jawab di lingkup regional Asia.

DKN dan TNC memiliki kepentingan bersama untuk mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan peningkatan kondisi yang kondusif bagi pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan melalui perbaikan peraturan perundangan dan kebijakan kehutanan.

APHI merupakan organisasi nirlaba yang mewadahi keberadaan perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maupun Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang didirikan pada tanggal 21 Nopember 1983.

TNC dan APHI memiliki kepentingan bersama untuk mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka percepatan pencapaian pengelolaan hutan berkelanjutan di tingkat operasional lapangan.

Informasi selanjutnya hubungi:

Dewan Kehutanan Nasional:

Diah Rahardjo, Executive Director

Telp: 021-57903082

Fax: 021-57903082

E-mail: draharjo@dkn.or.id

The Nature Conservancy:

Gunawan Wicaksono, Policy Manager RAFT

Telp: 021-72792043

Fax: 021-72792044

E-mail: gwicaksono@tnc.org

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia:

Ir. Nanang Roffandi Ahmad, Executive Director

Telp: 021-57903058

Fax: 021-5732564

E-mail: aphi@rimbawan.com